

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini:

1. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) dan penelitian oleh Cahaya pada tahun (2012).
2. *Government tenders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) dan juga penelitian oleh Amran dan Haniffa (2011).
3. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Muttakin & Subramaniam (2015), Cahaya et al (2017), dan Purwanto (2020).
4. *International operations* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Amran dan Haniffa (2011).

5. Keanggotaan UNGC tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sari, dkk (2020).
6. Komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Malau (2017) dan Silvia dan Hartomo (2019).
7. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016) dan Hartomo dan Purnamasari (2020).
8. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Healy dan Serafeim (2013) dan juga penelitian oleh Silvia dan Hartomo (2019).

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Pada akhir bagian dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Keterbatasan yang pertama terletak pada variabel keanggotaan UNGC yang merupakan organisasi sukarela

sehingga tidak ada kewajiban bagi para anggotanya untuk melakukan pemberantasan antikorupsi meskipun menjadi salah satu prinsip yang diangkat oleh UNGC, sehingga penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain apabila menggunakan variabel ini.

2. Keterbatasan yang kedua dalam penelitian ini terletak pada variabel *government tenders* yang dicerminkan hanya pada ada atau tidaknya proyek dari pemerintah, sehingga penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengkaitkan *government tenders* lebih kepada kondisi ketergantungannya pada proyek pemerintah agar lebih mencerminkan tekanan koersif yang lebih mendalam.

5.2.2 Saran

Pada akhir bagian dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan diberikan oleh peneliti untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain pada variabel keanggotaan UNGC dan juga lebih mengkaitkan *government tenders* dengan ketergantungan pada proyek pemerintah, tidak hanya melihat pada ada atau tidaknya proyek pemerintah.

2. Bagi perusahaan

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa frekuensi perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi masih tinggi yang mencerminkan rendahnya kesadaran transparansi dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh sebab itu, alangkah baiknya perusahaan-perusahaan terbuka lebih peka dan sadar akan pentingnya mengungkapkan kebijakan antikorupsi untuk mencegah tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam perusahaan itu sendiri dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik.

